

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amidhan, H, dkk. 2005. *Dari Konflik Agraria Ke Pengharapan Baru*. Cet. 1. Jakarta: Komnas HAM.
- Djojosoekarto, Agung, dkk. (2008). *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Cet. I. Jakarta: Kemitraan.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M.. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Indonesian University Press.
- Muchsin dan Putra, Fadillah. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averro Press.
- Mustopadidjaja. 2007. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- , 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patton, Carl dan Sawicki, David. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Englewood Cliffs: New Jersey.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Fadhillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. "Sesat Pikir" Politik Hukum Agraria Membongkar Atas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.

- Sihbudi, Riza, dkk. 2001. *Bara dalam Sekam Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Sumule, Agus. 2003. *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

Website

- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/04/n1vu0i-pengamat-hukum-adat-papua-eksis-di-era-globalisasi> Diakses tanggal 27 April 2015.
- http://papualiberationtheology.blogspot.com/2010/11/dilema-adat-pembayaran-maskawin_21.html. Diakses tanggal 12 Mei 2014.
- <http://tabloidjubi.com/2013/12/13/pemekaran-dan-migrasi-penduduk-di-tanah-papua/>. Diakses tanggal 16 Juli 2014.
- <http://www.biakkab.go.id/default.php?dir=pages&file=main&hal=profilsingkat>. Diakses tanggal 5 Desember 2014.
- <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi2/2010/nov/02/2083/pertanahan-di-papua-perlu-manajemen-baru>. Diakses tanggal 7 Juli 2014.
- <http://www.jaya-tv.com/artikels/951-bpn-papua-bertekad-selesaikan-sengketa-dan-konflik-tanah>. Diakses tanggal 7 Juli 2014.
- <http://www.majalahselangkah.com/content/hak-ulayat-tanah-jadi-masalah-utama-distrik-baru-iwaka>. Diakses tanggal 14 Juli 2014.
- <https://papua.go.id/> Diakses tanggal 7 Juli 2014

<https://tabloidjubi.wordpress.com/2008/05/11/masyarakat-adat-dan-lunturnya-nilai-adat-%E2%80%99Cironisnya-seringkali-mereka-dituding-perjuangkan-aspirasi-merdeka%E2%80%9D/>. Diakses tanggal 12 Mei 2014.

www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi Diakses tanggal 15 Juli 2014.

Jurnal dan Laporan

Awi, Sara Ida Magdalena. 2012. *Para-Para Adat sebagai Lembaga Peradilan Adat pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura* dalam Jurnal Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar (Bappeda dan LPPM UNHAS). 2010. *Pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Port Numbay Kota Jayapura*.

Bao, Bonifasius. *Kuatnya Kekuasaan Ondoafi Di Tengah Masyarakat Urban (Studi Tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua)*. Diakses Dari <http://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Politika/Article/View/4888>

Pemerintah Kota Jayapura Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kota Jayapura.

Rahman, Taufik. 19 Juli 2007. *Memulai Bisnis Sawit di Tanah Papua*. Lingkar Studi CSR www.csrintonesia.com.

Roembiak, Mientje D.E. Desember 2002. *Status Penggunaan dan Pemilikan Tanah dalam Pengetahuan Budaya dan Hukum Adat Orang Byak*. Jurnal Antropologi Papua Volume 1. No. 2.

Savitri, Laksmi A. *Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal* dalam Wacana NO. 33 | TAHUN XVI | 2014 Hal. 76. Yogyakarta: Insist. Diakses dari: www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana_33.pdf. Diakses tanggal 12 Juli 2014.

Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: FES Indonesia. Diakses dari: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06393.pdf>. Diakses tanggal 6 Juli 2014

Tanah Papua: *Perjuangan yang Berlanjut untuk Tanah dan Penghidupan*. Buletin DTE Edisi Khusus No. 89-90, November 2011. NP. Diakses dari: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/12/Down%20to%20Earth%20Newsletter%20December%202011%20-%20Bahasa.pdf>. Diakses tanggal 6 Juli 2014.

Sumber lainnya

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun 2014 tentang Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat dan Letigasi di Kabupaten Biak Numfor.

Rangkuman hasil rapat dengan pendapat tentang pemetaan dan penatan tanah adat Papua dalam prespektif orang asli (masyarakat adat) Papua